

**ANALISIS POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG PENDIDIKAN SESUAI
DENGAN KORIDOR EKONOMI MP3EI (MASTERPLAN PERCEPATAN DAN
PERLUASAN PEMBANGUNAN INDONESIA)**

Tria Anggita Hafsari
trianggita01@gmail.com

Sukamdi
sukamdi@ugm.a.c.id

ABSTRACT

Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Developmentor MP3EI is a strategic direction in the acceleration and expansion of Indonesia's economic development which has three pillars (clusters), the development of economic potential through economic corridors, improving connectivity and strengthening of national human resource capabilities and national science and technology. Analysis and study related pillars of human resources and strengthening the ability of national science and technology in the document MP3EI in each economic corridor received less discussion. Education index is a main indicator in improving the quality of human resources. Education index can be determined using the composite indicator for accessibility, capability, and educational facilities. Map suitability index for education development plans poles of economic growth suffered a miss - match. This shows that the potential of natural resources can not be optimized properly because it has not inability of human resources in Indonesia to process them. Equitable distribution of educational facilities became a major step to create educational equity and does migration towards the productive ages to areas that have low education index suitability for achieving the human resource potential of natural resources .

Keywords : MP3EI, Education Index, Composit Indicator

ABSTRAK

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang memiliki tiga pilar (kluster) yaitu pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, penguatan konektivitas nasional, dan penguatan kemampuan SDM dan Iptek nasional. Analisis dan kajian pendidikan guna menguatkan kemampuan SDM dan Iptek tidak dilakukan dengan detail. Indeks pendidikan merupakan indikator utama dalam meningkatkan mutu sumberdaya manusia. Indeks pendidikan dapat ditentukan dengan menggunakan metode indikator komposit terhadap aksesibilitas, kapabilitas, dan fasilitas pendidikan. Peta kesesuaian indeks pendidikan terhadap rencana pembangunan kutub-kutub pertumbuhan ekonomi mengalami *miss-match*. Hal ini menunjukkan bahwa potensi sumberdaya alam belum bisa dioptimalisasikan dengan baik karena belum mampunya sumberdaya manusia di Indonesia untuk mengolahnya. Pemerataan fasilitas pendidikan menjadi langkah utama untuk menciptakan pemerataan pendidikan serta dilakukannya migrasi terhadap usia-usia produktif ke wilayah yang memiliki indeks pendidikan rendah untuk tercapainya kesesuaian potensi sumberdaya manusia terhadap sumberdaya alam.

Kata kunci : MP3EI, Indeks pendidikan, Indikator komposisi

PENDAHULUAN

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) merupakan cetak biru mengenai strategi dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Proses penyusunan MP3EI merupakan inisiatif presiden yang disampaikan pada tanggal 30 Desember 2010 dalam Rapat Kabinet Terbatas. Presiden menganggap Indonesia kaya akan potensi dan keunggulan ekonomi sehingga perlu diadakan transformasi ekonomi berupa percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, MP3EI menjadi arahan pembangunan ekonomi Indonesia hingga tahun 2025.

Dokumen MP3EI merupakan dokumen yang bersifat komplementer dari dokumen perencanaan pembangunan nasional yakni RPJPN, RPJMN, dan lain-lain. Visi MP3EI selaras dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yakni "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur". Dengan visi tersebut maka strategi perluasan pembangunan ekonomi ini tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari sisi pendapatan dan daya beli masyarakat namun juga diiringi dengan peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia.

Penguatan kemampuan sumberdaya manusia dan IPTEK merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam dokumen MP3EI. Dua pilar utama lainnya adalah koridor ekonomi dan penguatan konektivitas nasional. Struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil

alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi di dalam negeri masih terbatas. Peranan MP3EI dalam struktur perekonomian Indonesia memberikan arahan strategis untuk pembangunan berdasarkan potensi alam yang dimiliki di tiap koridor ekonomi MP3EI. Pengembangan potensi melalui koridor ekonomi (6 koridor), yaitu: (1) Sumatra, (2) Jawa, (3) Kalimantan, (4) Sulawesi, (5) Bali -Nusatenggara, (6) Papua-Kepulauan Maluku, Pengembangan konektivitas intra dan inter koridor serta internasional (membangun konektivitas nasional) dan Peningkatan Kapasitas SDM dan IPTEK (Mempercepat kemampuan SDM dan IPTEK Nasional). Integrasi antar pilar-pilar tersebut menjadi suatu strategi bagi keberhasilan MP3EI namun pilar-pilar ini pun menimbulkan isu-isu permasalahan strategis terkait dengan penjabaran masing-masing dari pilar-pilar tersebut.

Fokus utama penyusunan MP3EI terletak pada pembentukan koridor-koridor ekonomi. Koridor-koridor ekonomi ditentukan untuk mengetahui persebaran potensi-potensi sumberdaya yang ada pada enam koridor tersebut. Pengembangan potensi melalui 6 koridor ekonomi yang dilakukan dengan cara mendorong investasi BUMN, Swasta Nasional dan FDI (*Foreign Direct Investment*) dalam skala besar di 22 kegiatan ekonomi utama. Penyelesaian berbagai hambatan akan diarahkan pada kegiatan ekonomi utama sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan realisasi investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di 6 koridor ekonomi. Untuk mampu mewujudkan tiap-tiap pilar maka pilar ketiga menjadi kunci utama, namun dalam MP3EI pilar ketiga yang mengusung

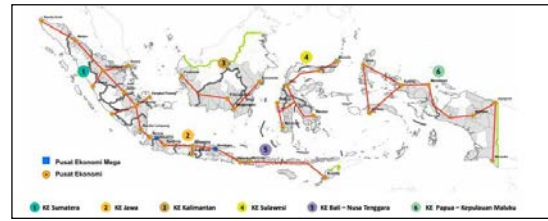
permasalahan SDM dan IPTEK tidak dikembangkan lebih rinci.

METODOLOGI

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud bersifat keilmuan, dimana tata cara untuk mendapatkan data didasarkan pada hal yang logis, empiris, dan sistematis (Sugiyono, 2011 : 3). Dalam hal penelitian sosial ekonomi, tahapan penelitian diawali dengan memahami objek penelitian yang merupakan unit analisis berupa satuan populasi. Menurut Sugiyono (2011), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada objek / subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan data-data sekunder dan analisis data. Kerlinger (1973) dalam Sugiyono (2011 : 12) mengemukakan bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian – kejadian relatif, distribusi, dan hubungan – hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, karena pada dasarnya penelitian ini merupakan evaluasi terhadap arahan kebijakan yang telah ada yakni dokumen MP3EI

Wilayah Kajian



Gambar 2.1. Koridor Ekonomi dalam Pengembangan Wilayah
Sumber : Dokumen MP3EI (2011)

Penelitian dilakukan dengan mengkaji koridor-koridor ekonomi beserta potensi masing-masing koridor tersebut di wilayah Indonesia yang telah ditentukan pada dokumen MP3EI. Berdasarkan potensi yang ada, maka sebaran sektor fokus dan kegiatan utama di setiap koridor ekonomi, diantaranya sebagai berikut:

1. Sumatera (Kelapa Sawit, Karet, Batubara, Besi-Baja dan JSS)
2. Jawa (Industri Makanan Minuman, Tekstil, Permesinan, Transportasi, Perkapalan, Alutsista, Telematika dan Metropolitan Jadebotabek)
3. Kalimantan (Kelapa Sawit, Batubara, Alumina/Bauksit, Migas, Perkayuan dan Besi-Baja)
4. Sulawesi (Pertanian Pangan, Kakao, Perikanan, Nikel, Migas)
5. Bali-Nusa Tenggara (Pariwisata, Peternakan dan Perikanan)
6. Papua - Maluku (*Food Estate*, Tembaga, Peternakan, Perikanan, Migas dan Nikel)

Materi Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan spasial yakni memetakan data-data indeks pendidikan yang terkait dengan Sumberdaya Manusia. Data yang telah dikumpulkan merupakan data spasial yang terdistribusi dalam keruangan dan bersifat kuantitatif, kemudian data kuantitatif tersebut dilakukan perhitungan laju pertumbuhan

penduduk, kepadatan pendudukan, ketenagakerjaan dan pendidikan untuk mengetahui distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dan pengaruh pendidikan terhadap lapangan pekerjaan yang mendominasi di masing-masing koridor ekonomi MP3EI pada penduduk yang bekerja.

Tahapan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan perhitungan data kuantitatif. Guna memperoleh data spasial yang kemudian dipetakan secara tematik maka penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap,

1. Tahap Pengumpulan Data

Melakukan telaah pustaka terkait informasi lingkup kajian, ketersediaan data sekunder hingga penelitian-penelitian yang terkait yang pernah dilakukan sebelumnya,

2. Tahap Perhitungan dan Pemetaan

a. Perhitungan data sekunder untuk mengetahui distribusi komposisi penduduk dan rasio ketergantungan penduduk di tiap koridor ekonomi dengan rumus :

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{\text{Indeks Kapabilitas} + \text{Indeks Aksesibilitas} + \text{Indeks Fasilitas}}{3}$$

Masing-masing komponen indeks pendidikan tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut ;

$$\text{Indeks } X_{(i)} = \frac{X_{(i)} - X_{(i)\min}}{[X_{(i)\maks} - X_{(i)\min}]}$$

dimana :

$X_{(1)}$: Indikator ke-i (i = 1, 2, 3)

$X_{(2)}$: Nilai maksimum sekolah
 $X_{(i)}$

$X_{(3)}$: Nilai minimum sekolah
 $X_{(i)}$

Tabel 2.3. Nilai Indikator
Komponen IPM

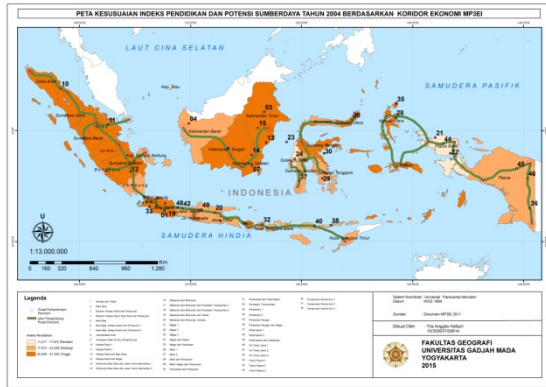
Indikator Komponen IPM (=X(I))	Nilai maksimum	Nilai Minimum	Catatan
Angka Harapan Hidup	85	25	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100	0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata lama sekolah	15	0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 1996	732.720 ^{a)}	300.000 ^{b)}	UNDP menggunakan PDB per kapita riil yang disesuaikan

Sumber : UNDP, 1993

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Indeks Pendidikan Menurut Koridor Ekonomi MP3EI

Pengukuran Indeks Pendidikan menggunakan indikator komposit yakni gabungan dari beberapa indikator pendidikan agar dapat memberikan gambaran atau cerminan yang tepat terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Indikator komposit tersebut adalah indeks kapabilitas, indeks aksesibilitas dan indeks fasilitas. Ketiga indikator komposit memiliki tingkat determinasi yang tinggi satu sama lain sehingga tidak dapat kita analisis kondisi pendidikan suatu wilayah dari satu perspektif saja. Peta Indeks Pendidikan di Indonesia Berdasarkan Koridor MP3EI mempresentasikan keadaan pendidikan antar propinsi di Indonesia. Peta Indeks Pendidikan dibuat dalam rentang tahun 2004-2010 untuk mengetahui perkembangannya.



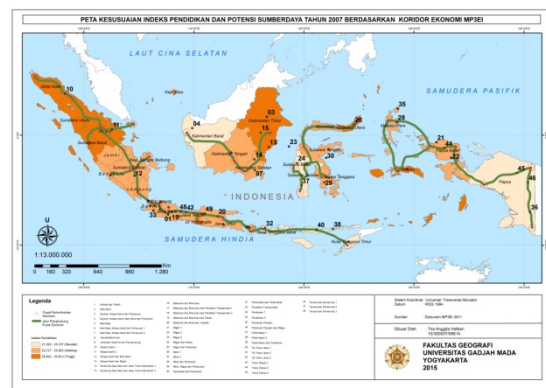
Gambar 1. Peta Indeks Pendidikan Tahun 2004 Berdasarkan Koridor Ekonomi MP3EI

Tahun 2004 juga menjadi tahun transisi antara kepemimpinan Presiden B.J.Habibie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mana terjadi perubahan perkembangan demokrasi dalam hal perencanaan pembangunan lima tahunan dari PROPENAS (2000-2004) menjadi RPJMN (2004-2009).

Hasil evaluasi RPJMN tersebut selaras dengan hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini guna mendapatkan Indeks Pendidikan di tahun 2004 yakni masih tingginya ketimpangan terutama pada dimensi fasilitas, aksesibilitas dan kapabilitas, ketiga dimensi ini juga menjadi indikator komposit dalam pengukuran indeks pendidikan. Indeks aksesibilitas di Indonesia masih berada di titik yang kritis karena persentasenya masih cukup jauh dari 90 persen bahkan untuk Propinsi Kep. Riau, Sulawesi Barat, dan Papua Barat yang persentasenya cukup jauh dibandingkan dengan persentasenya rata-rata nasional yakni secara berurutan 26,67 persen, 19,67 persen, dan 23,67 persen.

Tahun 2007 masih termasuk dalam pelaksanaan RPJMN 2004-2009 sehingga kurang lebih program dan target pencapaiannya sama dengan tahun 2004. Apabila mengamati data spasial persentase indeks pendidikan berdasarkan

koridor MP3EI di tahun 2007 dapat diamati bahwa klas rendah cukup mendominasi berbeda dengan tahun 2004 yang cukup didominasi dengan klas sedang. Apabila pengamatan hanya dilakukan dengan melihat warna-warna yang merepresentasikan klas tinggi, sedang, dan rendah pada peta maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa tahun 2007 mengalami penurunan terhadap nilai persentase indeks pendidikan dibandingkan dengan tahun 2004.



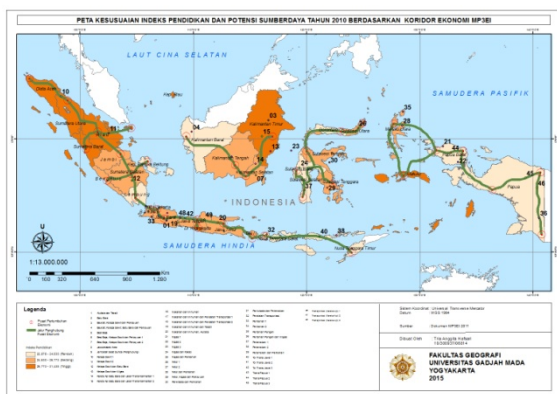
Gambar 2. Peta Indeks Pendidikan Tahun 2007 Berdasarkan Koridor Ekonomi MP3EI

Apabila pengamatan hanya dilakukan dengan melihat warna-warna yang merepresentasikan klas tinggi, sedang, dan rendah pada peta maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa tahun 2007 mengalami penurunan terhadap nilai persentase indeks pendidikan dibandingkan dengan tahun 2004. Namun, jika diamati pula nilai persentase pada tiap jenjang klas, yaitu klas rendah 33,52 – 40,89 persen ; klas 40,89 – 48,24 persen dan klas tinggi 48,24 – 69,42 persen maka dapat kita akan sampai pada kesimpulan bahwa *gap* indeks pendidikan yang terjadi di tahun 2007 semakin jelas.

Tahun 2010 telah memasuki periode perencanaan pembangunan yang baru, sehingga terdapat perubahan substansi dan struktur terhadap

penyusunan RPJMN 2010-2014 yang mana pada periode ini RPJMN mengeluarkan tiga buku yang saling terkait.

Banyaknya pulau-pulau kecil sangat mempengaruhi aksesibilitas dalam mendapatkan pendidikan, berbeda dengan Pulau Sumatra yang aksesibilitasnya terhadap Pulau Jawa, *center of development*, lebih mudah karena hanya dibatasi oleh selat, pun terhadap pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Sumatra dan Jawa. Kesenjangan dalam memperoleh pendidikan di Indonesia tentunya akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan perekonomian, wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya mengalami permasalahan ekonomi akan mengalami ketidakejahteraan dalam hidupnya. Padahal tujuan utama dari pembangunan adalah kesejahteraan sosial dan ketika salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan sosial tidak stabil maka pencapaian kesejahteraan sosial akan sulit.

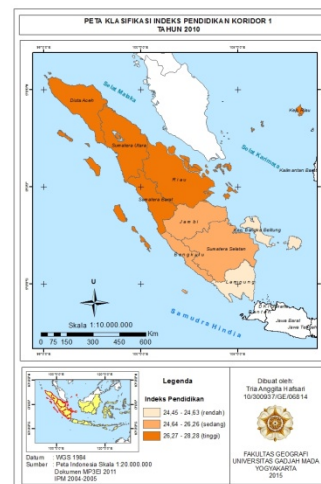


Gambar 3. Peta Indeks Pendidikan Tahun 2010 Berdasarkan Koridor Ekonomi MP3EI

Indikasi yang terjadi bahwa adanya daerah-daerah dalam lingkup propinsi yang masih sulit untuk menjangkau pendidikan, luas wilayah dan kondisi geografis dapat menjadi faktor yang mempengaruhi persentase indeks

aksesibilitas wilayah tersebut. Meskipun sebagian Jawa memiliki indeks aksesibilitas yang rendah dibandingkan dengan beberapa wilayah di Sumatera tetapi nilai persentase indeks pendidikan di sebagian wilayah Jawa tersebut tetap lebih tinggi dibandingkan dengan Propinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau karena indeks fasilitas dan indeks kapabilitasnya memiliki nilai persentase yang lebih tinggi. Indeks kapabilitas sangat dipengaruhi oleh indeks aksesibilitas tapi tidak berarti determinasi yang terjadi yang terjadi searah, semakin tinggi indeks aksesibilitas maka semakin tinggi pula indeks kapabilitasnya.

B. Kesesuaian Antara Koridor Ekonomi dan Potensi Sumberdaya Manusia Tahun 2010



Gambar 3. Peta Klasifikasi Indeks Pendidikan Koridor I Tahun 2010

Pengembangan ekonomi di koridor I dengan jenis komoditas yang telah ditentukan yakni sawit, karet, batubara, besi-baja dan JSS dalam dokumen MP3EI pada dasarnya membutuhkan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi teknologi dan ketrampilan. Berdasarkan gambar 3 peta klasifikasi indeks pendidikan koridor I yang masuk dalam klas tinggi hanya

Propinsi Sumatera Utara, sehingga potensi SDM pada koridor I ini untuk mengolah potensi alam yang tersedia kurang memungkinkan untuk pengembangan ekonomi tersebut.

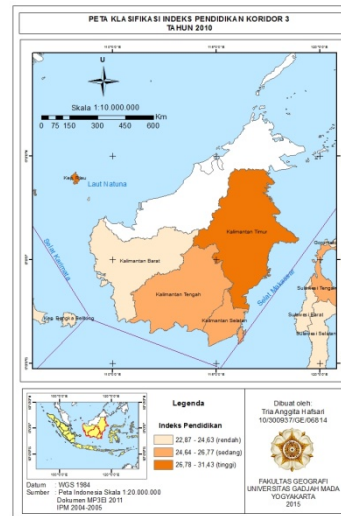


Gambar 4. Peta Klasifikasi Indeks Pendidikan Koridor II Tahun 2010

Koridor II, hampir seluruh wilayahnya memiliki nilai indeks persentase yang tinggi di tahun 2010 kecuali Banten dan Yogyakarta. Kedua propinsi tersebut masuk dalam klas sedang, hal ini dipengaruhi oleh luas wilayah di kedua propinsi tersebut yang tidak lebih luas dari propinsi lainnya. Indeks pendidikan yang tinggi pada koridor ini mampu mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang di tekankan pada sektor jasa. Mengembangkan sektor jasa pada koridor II merupakan strategi yang cukup tepat mengingat sektor jasa lebih bersifat dinamis dan fleksibel karena dapat berasal dari tenaga kerja formal dan informal. Di pasar negara sektor informal dapat berkembang dengan baik apabila diikuti oleh pembangunan infrastruktur industri dan kemajuan teknologi.

Potensi SDA yang dimiliki di Koridor III memiliki kesamaan dengan koridor I yakni kaya akan hasil tambang dan perkebunan, seperti intan, batubara, sawit, karet dsb. Namun kekayaan potensi SDA di koridor ini tidak didukung dengan

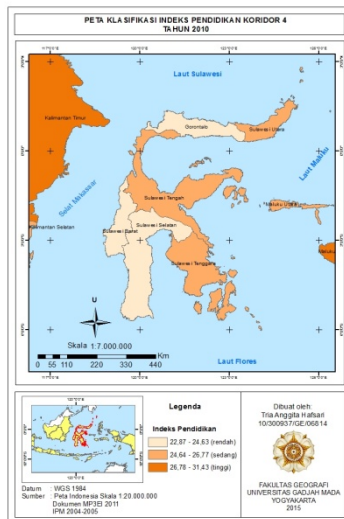
indeks pendidikan yang baik dapat dilihat pada gambar 5.6. propinsi-propinsi koridor III tidak ada yang berada pada klas tinggi



Gambar 5. Peta Klasifikasi Indeks Pendidikan Koridor III Tahun 2010

Indeks pendidikan yang cenderung rendah pada koridor III ini menunjukkan bahwa sumberdaya manusia di wilayah ini lebih kurang produktif dalam mencipta dan berkarya sehingga belum mampu menyesuaikan kompetensi teknologi yang dibutuhkan dalam bidang-bidang terkait arahan yang ditentukan di koridor III Sektor jasa pada koridor III memiliki dominasi yang cukup tinggi. Sedangkan apa yang direncanakan pada dokumen MP3EI tidak ada yang bergerak pada sektor jasa. Potensi alam yang ada ternyata tidak diimbangi dengan potensi sumberdaya manusia yang berkembang, umumnya penduduk bekerja pada bidang jasa. Hal ini mengindikasikan kurangnya penduduk yang memiliki keahlian khusus dan pengetahuan yang terkait dengan potensi alam yakni batubara, bauksit, migas dsb. Beberapa daerah di koridor ini seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat juga sektor pertaniannya cukup tinggi tapi tidak

dengan sektor manufaktur yang cenderung rendah disini.

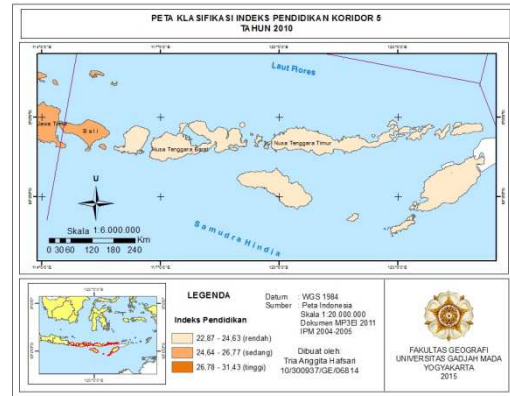


Gambar 6. Peta Klasifikasi Indeks Pendidikan Koridor IV Tahun 2010

Sebagian besar provinsi di koridor IV memiliki indeks pendidikan yang sedang, kecuali di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dengan indeks pendidikan yang tinggi. Nilai indeks pendidikan ini cukup untuk pembangunan ekonomi di bidang pertanian pangan, kakao, dan perikanan, namun belum mencukupi untuk bidang nikel dan migas. Terkait dengan bidang nikel dan migas, perlu ada peningkatan ketrampilan teknologi untuk memajukan kualitas manusia yang mampu meningkatkan kegiatan pengembangan ekonomi yang telah diarahkan tersebut. Potensi sumberdaya manusia yang tinggi hanya terpusat di Sulawesi Utara. Hal ini kemungkinan terjadi karena kurangnya integrasi antar pemerintah provinsi dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang tinggi.

Persentase lapangan kerja sektor jasa di koridor tersebut cenderung stabil. Untuk Gorontalo, Sulawesi Utara, sektor jasa tersebar lebih banyak dibanding propinsi lainnya di koridor tersebut. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia,

pertumbuhan sektor jasa di propinsi ini cukup signifikan dari tahun ketahun. Pelayanan jasa dan sektor jasa pariwisata mendominasi koridor ini.

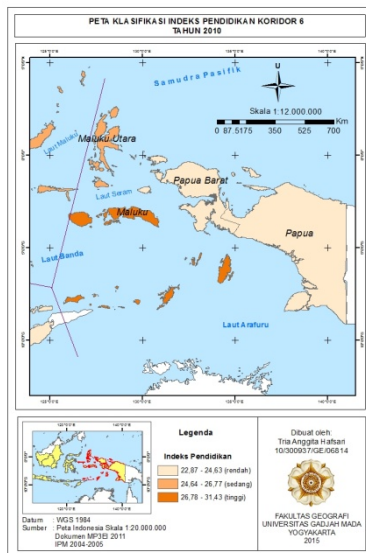


Gambar 7. Peta Klasifikasi Indeks Pendidikan Koridor V Tahun 2010

Indeks pendidikan di koridor V termasuk dalam termasuk dalam klas rendah. Hal ini akan menjadi kendala terhadap pembangunan ekonomi di koridor ini sebab rendahnya kualitas sumberdaya manusia akan menghambat pembangunan daerah. Khususnya pada bidang pariwisata, perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan riset melalui kolaborasi antar pemerintah agar pembangunan ekonomi dari sisi pariwisata dapat berjalan baik. Peningkatan pariwisata perlu mendapat perhatian khusus terhadap sumberdaya manusia karena akan sangat berdampak baik bagi pengembangan ekonomi nasional. Pengembangan ekonomi di bidang peternakan dan perikanan juga belum dapat berjalan baik dengan nilai IPM yang rendah karena apabila kualitas manusianya rendah, maka pengembangan tersebut tidak berjalan optimal.

Wilayah Bali pada koridor V yang memang telah terkenal pada bidang pariwisatanya masuk pada klasifikasi tinggi untuk lapangan kerja pada sektor jasa. Hal ini memang telah sesuai dengan apa yang telah berkembang dan apa yang akan diperluas pembangunan ekonominya.

Untuk wilayah Nusa Tenggara sektor jasa tidak berkembang dengan pesat, tentunya ini menjadi celah baik untuk mengembangkan dan memperluas pembangunan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi alam yang ada yakni peternakan dan perikanan.



Gambar 8. Peta Klasifikasi Indeks Pendidikan Koridor V Tahun 2010

Nilai pendidikan di koridor VI masuk dalam klasifikasi rendah. Rendahnya nilai indeks pendidikan ini menunjukkan bahwa belum adanya kesiapan sumberdaya manusia terhadap pembangunan ekonomi yang telah ditentukan. Hal ini akan berdampak buruk terhadap ekonomi di koridor ini, sebab kualitas manusia masih sangat rendah. Potensi sumberdaya manusia di koridor VI belum disesuaikan dengan potensi sumberdaya alamnya, sehingga sumberdaya manusia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah perlu fokus terlebih dahulu terhadap pembangunan sumberdaya manusia di Papua dan Maluku sebelum pembangunan ekonomi dilaksanakan, khususnya terkait pengentasan angka buta huruf. Koridor memiliki angka melek huruf terendah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, Aris dan Sri Harijati Hatmadji. 1985. *Mutu Modal Manusia : Suatu Analisis Pendahuluan*. Jakarta : LDE Universitas Indonesia
- Ariani, D.W. 2004. *Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Kuantitatif. Dalam Manajemen Kualitas)*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2010*.
- Hadari, Nawawi. 2001. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Morris, Morris David. 1979. *Measuring the Condition of the Woeld's poor: The Physical Quality of Life Index*. New York: PergamonPress
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, No. 115. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Suroto, 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Statistik Indonesia. 2010. *Kependudukan di Indonesia*. Jakarta : BPS

Todaro, Michael.P. dan Stephen C. Smith (2006), *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta.

Tukiran. 2001. *Penduduk dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Reorientasi Kebijakan Kependudukan. Faturochman dan Agus Dwiyanto (eds) hal. 13-34.* Yogyakarta : Aditya Media

Tukiran. 2011. *Kompilasi Bahan Ajar : Pembangunan Sumberdaya Manusia.* Yogyakarta : Geografi UGM

UNDP. 1995. *Human Development Report 1993.*

United Nations. 1990. *Populations and Development Planning.* Yogyakarta : PSKK UGM

Wirartha, I Made. 2006.*Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi.* Yogyakarta : Penerbit Andi.